

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah, hal ini hanya dapat terwujud bila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajiban sebagai warga negara. salah satu faktor penting yang merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pembangunan adalah Pajak. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang. Undang-undang pajak yang berdasarkan keadilan sesuai dengan beban yang dipikul berdasarkan kemampuan rakyat dan non diskriminasi, menjamin kepastian hukum dan mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara yaitu Asas undang-undang pajak yang universal.

Pajak Daerah adalah suatu sumber pendapatan yang sangat penting untuk daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah an pembangunan daerah memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.

Semenjak dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah harus mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah yang sumber penerimaannya dipungut dari suatu daerah. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah semenjak diberlakukannya otonomi daerah. Pemungutan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang didirikan bersama-sama dengan peraturan daerah.

Dengan adanya otonomi, daerah dipacu agar dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Pajak hotel adalah salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup semua persewaan di hotel.

Dengan Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah harus memberi peluang bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding

dengan peraturan-peraturan yang sebelumnya lebih banyak memberi keleluasaan untuk pemerintah di atasnya. Untuk mendukung eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan, suatu daerah yang dapat dihadapkan pada tantangan dalam mempersiapkan strategi untuk perencanaan pembangunan yang harus diambil. Walaupun harus diakui bahwa dengan kedua undang-undang dapat merangsang daerah agar melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaannya. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat untuk memperhatikan potensi yang harus dimiliki terutama untuk mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sektor yang lainnya.

Menurut Rahmanto (2007) potensi pajak hotel dapat dilihat berdasarkan pada data jumlah kamar setiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel. Berdasarkan dari potensi yang dicapai dari data realisasi penerimaan pajak hotel maka dari itu dapat diketahui efektifitas dari pajak hotel. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa nilai potensinya semakin besar maka otomatis akan meningkatkan nilai efektifitas dari pajak hotel.

Dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor Perdagangan dan Hotel, khususnya hotel dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Surabaya dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Sehingga perlu dilakukan identifikasi mengenai variabel-variabel yang terkait dengan usaha peningkatan penerimaan pajak hotel serta tindakan/ usaha-usaha yang kiranya perlu dilakukan

dalam rangka memanfaatkan potensi pajak hotel yang belum optimal. Sektor Perdagangan dan Hotel merupakan sektor potensial di Kota Surabaya

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa tempat tinggal atau penginapan sementara selama berada di Kota Surabaya. Hotel juga bisa digunakan sebagai sarana bermain, pesta ulang tahun, pernikahan, dan acara yang lainnya. Dengan bertambahnya hotel atau penginapan maka laju pertumbuhan hotel semakin tinggi yang dapat membuat penerimaan pajak daerah pun ikut meningkat. sehingga kenyataannya kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD sangat rendah. Rendahnya kontribusi penerimaan pajak terhadap PAD didasarkan pada penggalan potensi yang masih rendah dan kinerja pemungutan yang masih kurang efektif di mana dalam pemungutan pajak dipengaruhi oleh dua hal yaitu kepatuhan pajak yang mencakup wajib pajak dalam membayar pajak dan penggalan potensi yang mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kota Surabaya adalah salah satu kota yang cukup berkembang dalam bidang pembangunan. Mulai dari pembangunan yang diperuntukan untuk kepentingan umum maupun kepentingan khusus. Hotel menjadi contoh objek yang dibangun cukup banyak di kota Surabaya oleh beberapa pengusaha untuk kepentingan ekonomi yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Seiring berkembangnya globalisasi yang serba cepat dan mudah, hal ini menjadi objek yang bermanfaat juga bagi masyarakat kota Surabaya dalam kebutuhan atau pemanfaatan fasilitas dari hotel. Berdasarkan fenomena yang terjadi adanya pertumbuhan hotel ini, tidak hanya berguna untuk pengusaha dan pengguna

fasilitas hotel saja, akan tetapi juga berguna bagi perolehan pendapatan Daerah Kota Surabaya dalam bentuk kontribusi pajak hotel.

Penerimaan Pajak Hotel merupakan kontribusi yang cukup mempengaruhi peningkatan jumlah Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Surabaya. Langkah awal untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Asli Daerah yang signifikan pemerintah daerah kota Surabaya perlu menetapkan target-target yang harus dicapai pertahunnya. Dalam mencapai target-target yang sudah ditetapkan tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan dalam perolehan penerimaan dari pajak hotel yang menyebabkan tidak terpenuhi target. Hal ini bahkan terjadi pada tahun terakhir, pajak hotel belum mencapai target. Pada tahun 2015 pajak hotel ditarget sebesar RP 200 myliar namun yang terealisasi sebesar RP187 myliar. Berbeda dengan pajak hotel, tahun 2015 terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (sumber data: Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya).

Pencapaian atas pemenuhan target bisa terealisasi apabila adanya program-programnya yang tepat untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Surabaya yang bermanfaat kedepannya bagi pemerintah dalam usaha perolehan pendapatan daerah. Selain itu, perlu adanya rasa pertanggung jawaban terhadap kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Berdasarkan Latar Belakang masalah, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang **“SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA”**.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Maksud dan Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya adapun Tujuan lain penulisan tugas Akhir ini, yaitu sebagai salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Ahli Madya(Amd) Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia(STIESIA) Surabaya

1.3 Manfaat Studi Lapang

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak terkait, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern penerimaan pajak hotel di lingkungan pemerintah daerah. Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern penerimaan pajak hotel terhadap efektivitas penerimaan daerah.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Diharapkan dapat memberikan referensi tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan usaha peningkatan Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Surabaya.

3. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber informasi untuk kajian selanjutnya, khususnya untuk mengatasi topic-topik yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Untuk menghindari adanya pembahasan masalah yang cukup luas maka perlu di tentukan ruang lingkup masalah yang diteliti. Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah dibahas ruang lingkup masalah yang akan dibahas adalah informasi yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian. Dalam studi lapang ini yang menjadi obyeknya adalah Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan oleh penanya dan narasumber untuk membahas dan menggali informasi guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan antara peserta

studi lapang dengan petugas yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Surabaya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

